

**LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024**



**RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2023**

**LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI
KARANGANYAR
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN
KARANGANYAR
TAHUN 2024**



**RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan sebagai sebuah unit kerja memegang peranan penting dan utama dalam mewujudkan rencana pembangunan yang menyeluruh (komprehensif) baik secara materi (isi) maupun keterkaitan wilayah (Pusat-Daerah).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan satu dokumen rencana resmi yang mempunyai fungsi sangat penting dan fundamental. Renja adalah rencana pelaksanaan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi / unit / organisasi terendah dan terkecil dari pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat atasnya. Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat menentukan kualitas pelayanan Perangkat Daerah kepada masyarakat penggunaannya. Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan Perangkat Daerah dalam melaksanakan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat keefektifan, pertanggungjawaban dan dampak/manfaat dari pelaksanaan kegiatan, serta terlaksananya maksud dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja BAPERLITBANG Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Karanganyar – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah

- Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);
 28. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11).

29. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 16).
30. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 34).

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud dari disusunnya rencana kerja ini adalah :

1. Memenuhi Amanat Undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Mengumpulkan data dan informasi yang evaluasi dan analisis untuk menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur BAPERLITBANG dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan;
4. Menentukan prioritas-prioritas kegiatan di urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan.

B. Tujuan penyusunan Renja BAPERLITBANG untuk:

1. Tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan urusan perencanaan, urusan penelitian dan pengembangan;
2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah;
3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan Pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPJMD);
4. Terwujudnya SDM perencana yang berkualitas.

5. Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja BAPERLITBANG Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BAPERLITBANG agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang alasan, proses penyusunan, keterkaitan antara dokumen RKPD, Renstra dan Renja BAPERLITBANG

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur dan dijadikan acuan dalam penyusunan Renja BAPERLITBANG.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BAPERLITBANG.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja BAPERLITBANG, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPERLITBANG TAHUN LALU

Pada Bab ini dijelaskan hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023, disusun dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPERLITBANG Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2023

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPERLITBANG tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BAPERLITBANG Tahun 2018-2023 di tahun keempat (2022).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPERLITBANG

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BAPERLITBANG berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing BAPERLITBANG, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPERLITBANG

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan BAPERLITBANG;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BAPERLITBANG; dan
- 3) Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN dan SASARAN BAPERLITBANG

Memuat Tujuan dan sasaran renja diambil dari tujuan dan sasaran rumusan Renstra BAPERLITBANG Tahun 2024-2026. Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target tahun 2024-2026. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BAPERLITBANG.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Disajikan dalam bentuk matrik rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

Dalam sistem perencanaan dengan diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mulai tahun 2021 sebagai ganti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, cukup banyak perubahan yang harus dilakukan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Semula sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ada 11 program dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ada 4 program sehingga untuk perencanaan yang berkelanjutan dilakukan pemetaan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan, agar tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan di Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 bisa tetap berkesinambungan. Pemetaan dilakukan agar setiap kegiatan sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bisa dilanjutkan sesuai dengan sub kegiatan di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPERLITBANG Tahun 2022 dan Perkiraan Kinerja Renja Tahun 2023

Evaluasi pelaksanaan Renja Baperlitbang Tahun 2022 dan Tahun berjalan (2023) bertujuan untuk mengetahui tingkat capaian target, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan renja tersebut, untuk dijadikan bahan / acuan dalam perencanaan tahun berikutnya. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi program dan pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kegiatan yang melampaui, sesuai maupun yang kurang dari target. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk bahan perencanaan di tahun berikutnya agar lebih baik dari tahun lalu dan berkesinambungan.

Evaluasi RKPD Tahun 2022 ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi Program kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2022 dan perkiraan pencapaian tahun 2023. Tahun 2022 merupakan tahun kebangkitan setelah dilanda pandemi atau bencana Nasional. Pandemi covid 19 yang berdampak revisi atau penyesuaian target indikator kegiatan dengan kondisi yang ada maupun ketersediaan anggaran.

Di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, tahun 2022 merupakan tahun kebangkitan setelah pandemi yang mana ketersediaan anggaran sudah menyesuaikan dengan target indikator yang telah direvisi pada Perubahan Renstra Baperlitbang 2018-2023 dan Perubahan Renja Baperlitbang 2022. Pelaksanaan kegiatan maupun koordinasi dengan pihak lain berangsur-angsur dilaksanakan secara offline, walaupun tetap ada yang dilakukan secara daring tergantung pada situasi, kondisi penyelenggaraan, peserta dan urgensi kegiatan tersebut.

2.1.1. Evaluasi Anggaran

a. Perbandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Pada tahun 2022 dan 2023 BAPERLITBANG telah merencanakan program, Kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi dana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.

Persandingan Alokasi Dana Renja dan APBD di Baperlitbang
Tahun 2022 dan 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	ANGGARAN TAHUN 2022			ANGGARAN TAHUN 2023		
		RENJA PERUBAHAN	APBD PERUBAHAN	%	RENJA PENETAPAN	APBD PENETAPAN	%
	PERENCANAAN						
1	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.606.022.400	5.126.318.650	111%	4.980.568.400	5.150.415.698	103%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.026.000	64.741.000	101%	100.237.500	101.037.500	101%
	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	64.026.000	64.741.000	101%	86.837.500	87.637.500	101%
	Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD				3.000.000	3.000.000	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.000.000	4.000.000	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.400.000	6.400.000	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.093.542.000	4.204.018.250	103%	4.112.542.000	4.221.789.298	103%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.054.542.000	4.154.838.250	102%	4.054.542.000	4.164.389.298	103%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.000.000	49.180.000	126%	51.700.000	51.700.000	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				6.300.000	5.700.000	90%
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.391.000	3.393.900	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3.391.000	3.393.900	100%
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.000.000	132.255.000	4409%	15.365.000	15.365.000	100%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				3.000.000	3.000.000	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	ANGGARAN TAHUN 2022			ANGGARAN TAHUN 2023		
		RENJA PERUBAHAN	APBD PERUBAHAN	%	RENJA PENETAPAN	APBD PENETAPAN	%
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.000.000	4.855.000	162%	6.000.000	6.000.000	100%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				6.365.000	6.365.000	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		127.400.000				
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	146.661.400	223.009.400	152%	226.882.400	222.263.900	98%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.547.000	8.633.000	101%	10.000.000	12.806.000	128%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.912.100	13.970.100	157%	10.928.700	12.471.200	114%
	Penyediaan bahan logistik kantor	10.000.000	12.000.000	120%	12.000.000	12.000.000	100%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.169.800	5.894.800	82%	12.060.100	12.970.100	108%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.840.000	3.840.000	100%	2.760.000	2.760.000	100%
	Penyediaan Bahan/Material	9.126.000	9.126.000	100%	14.984.200	15.045.700	100%
	Fasilitas Kunjungan Tamu	9.588.000	19.788.000	206%	16.695.000	16.695.000	100%
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	74.706.000	132.606.000	178%	111.583.000	111.594.500	100%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.762.500	7.762.500	100%	8.942.100	8.942.100	100%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.010.000	9.389.000	134%	26.929.300	16.979.300	63%
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.000.000	135.225.000	386%	113.159.500	116.109.500	103%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	135.225.000	386%	113.159.500	116.109.500	103%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.450.000	159.270.000	137%	138.676.600	195.882.600	141%
	Penyediaan jasa surat menyurat	31.030.000	37.630.000	121%	22.756.600	22.762.600	100%
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	44.100.000	72.200.000	164%	66.600.000	123.800.000	186%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	41.320.000	49.440.000	120%	49.320.000	49.320.000	100%
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	147.343.000	207.800.000	141%	270.314.000	274.574.000	102%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.910.000	124.460.000	126%	171.110.000	171.090.000	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.040.000	31.440.000	131%	39.000.000	43.280.000	111%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.393.000	51.900.000	213%	60.204.000	60.204.000	100%
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	700.000.000	780.000.000	111%	1.108.000.000	1.108.000.000	100%
9.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	302.000.000	560.000.000	185%	833.000.000	833.000.000	100%
	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota	302.000.000	560.000.000	185%	833.000.000	833.000.000	100%
10.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000	10.000.000	100%	20.000.000	20.000.000	100%
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000	10.000.000	100%	20.000.000	20.000.000	100%
11.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	388.000.000	210.000.000	54%	255.000.000	255.000.000	100%
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	358.000.000	200.000.000	56%	235.000.000	235.000.000	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022			ANGGARAN TAHUN 2023		
		RENJA PERUBAHAN	APBD PERUBAHAN	%	RENJA PENETAPAN	APBD PENETAPAN	%
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	30.000.000	10.000.000	33%	20.000.000	20.000.000	100%
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.168.546.600	1.278.546.600	109%	1.425.000.000	1.425.000.000	100%
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	373.546.600	373.546.600	100%	485.000.000	485.000.000	100%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	120.000.000	120.000.000	100%	125.000.000	125.000.000	100%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	53.546.600	53.546.600	100%	60.000.000	60.000.000	100%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	200.000.000	200.000.000	100%	300.000.000	300.000.000	100%
13.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	375.000.000	470.000.000	125%	470.000.000	470.000.000	100%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	108.850.000	108.850.000	100%	145.000.000	145.000.000	100%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	157.669.000	252.669.000	160%	75.000.000	75.000.000	100%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	108.481.000	108.481.000	100%	250.000.000	250.000.000	100%
14.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	420.000.000	435.000.000	104%	470.000.000	470.000.000	100%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	160.000.000	160.000.000	100%	150.000.000	150.000.000	100%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	40.000.000	40.000.000	100%	50.000.000	50.000.000	100%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	220.000.000	235.000.000	107%	270.000.000	270.000.000	100%
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	285.000.000	285.000.000	100%	300.000.000	550.000.000	183%
15.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	285.000.000	285.000.000	100%	300.000.000	550.000.000	183%
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	285.000.000	285.000.000	100%	300.000.000	550.000.000	183%

Sumber : Baperlitbang, 2023 diolah

Pemenuhan alokasi dana di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk Tahun 2022, dengan membandingkan antara Rencana (Renja Perubahan) dan Realisasi (APBDP) diketahui sebesar 110,51%, sedangkan untuk Tahun 2023, sampai ditetapkannya APBD

tahun 2023 adalah sebesar 105,37%. Besar kecilnya input dana setiap subkegiatan, akan mempengaruhi keluaran dari setiap subkegiatan.

b. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Alokasi dana sebesar Rp. 7.469.865.250,00 dengan Realisasi capaian sebesar Rp. 7.208.513.542,00 atau **96,50 %**. Namun jika dihitung dari persentase serapan 4 program maka kinerja anggaran semua program adalah = 97,26%, lebih baik dibanding tahun 2021 yang sebesar 96,60%, sebagaimana table berikut :

Tabel 2.2.

Persandingan Realisasi Anggaran Renja dan Rata-rata Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2022

No	Program	2021			2022		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.036.375.400	4.949.653.437	98,28%	1.278.546.600	1.249.123.482	97,70%
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	784.639.800	761.742.613	97,08%	5.126.307.650	4.910.566.770	95,79%
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.160.846.800	1.090.481.213	93,94%	780.000.000	774.557.360	99,30%
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	105.000.000	101.942.329	97,09%	285.000.000	274.265.930	96,23%
	Persentase realisasi	7.086.862.000	6.903.819.592	97,42%	7.469.854.250	7.208.513.542	96,50%
	Rata-rata serapan 4 program			96,60%			97,26%

2.1.2. Evaluasi Kinerja (Indikator)

a. Perbandingan target dengan realisasi tahun 2022

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2022 pada Renstra Tahun 2018-2023 menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.3.

Hasil Indikator Kinerja Tahun 2022 pada Renstra Tahun 2018-2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Sasaran Kinerja Tahun 2022			Target Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Renstra 2018-2023
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai	82,39	73,56	89,28%	82,39	87,39
1.1. Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD	%	100	100	100,00%	100	100
	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	%	100	100	100,00%	100	100
1.2. Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perencanaan pembangunan	Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	%	86	83,5	97,09%	90	90
	Persentase realisasi capaian RPJMD	%	84	86	102,38%	88	88
1.3. Meningkatnya hasil kelibangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	%	45	57	126,67%	50	50
	Persentase inovasi yang diimplementasikan	%	45	78,69	174,87%	50	50
Kinerja Baperlitbang tahun 2022					112,90%		

Sumber Baperlitbang, 2023, diolah

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut kinerja BAPERLITBANG Tahun 2022 adalah **sangat baik**, dimana capaian target indikator rata-rata mencapai **112,90%**. Meskipun ada satu catatan yang tidak tercapai yaitu:

(1) Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP) : 89,28%, dikarenakan :

- Kurangnya sinkron antara Renstra dengan Renja, terutama konsistensi indikatornya;
- Serapan anggaran yang kurang maksimal
- Format pelaporan yang kurang menunjukkan hukum sebab akibat (cascading)

(2) Persentase hasil musrenbang yang ditampung dalam RKPD dengan kinerja 97,1%. Dikarenakan :

- Masih terlalu bebasnya OPD / Masyarakat (desa/kel) / Swasta membuat usulan;
- Kurang efektifnya pelaksanaan Musrenbang / masih bebas usul, tidak ada kepastian besaran dana, jumlah kegiatan usulan karena belum ada pembatasan hasil musrenbang, pembatasan waktu input usulan longgar / kurang ketat
- Usulan masih bersifat keinginan
- Kurang optimalnya kegiatan forum OPD ataupun Forgab OPD

b. Perbandingan kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Pada bagian ini adalah evaluasi yang dilakukan dengan cara membandingkan kinerja tahun 2022 dengan kinerja tahun 2021. Evaluasi dilakukan untuk melihat kinerja BAPERLITBANG lebih baik (naik) atau lebih jelek (turun). Hasil ini kemudian dianalisa untuk diketahui penyebabnya sehingga dapat diantisipasi untuk rencana tahun berikutnya. Secara ringkas evaluasi ini dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.4.

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja 2022	Kinerja 2021	Ket
1	2	3	6	7	8
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai	89,28	95,05%	
1.1. Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD	%	100,00%	100,00%	
	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	%	100,00%	100,00%	
1.2. Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perencanaan pembangunan	Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	%	97,09%	101,00%	
	Persentase realisasi capaian RPJMD	%	102,38%	101,00%	
1.3. Meningkatnya hasil kemitraan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	%	126,67%	125,00%	
	Persentase inovasi yang diimplementasikan	%	174,87%	100,00%	
Kinerja Baperlitbang tahun 2022			112,90%	105,88%	

Sumber Baperlitbang, 2023, diolah

c. Perbandingan kinerja tahun 2022 dengan tahun terakhir (Renstra/ RPJMD)

Pada bagian ini adalah evaluasi yang dilakukan dengan cara membandingkan kinerja tahun 2022 dengan target tahun terakhir (tahun 2023) Renstra BAPERLITBANG atau RPJMD tahun 2018-2023. Evaluasi dilakukan untuk melihat capaian indikator yang menjadi target dalam RPJMD sudah tercapai atau belum. Hasil ini kemudian dianalisa untuk diketahui penyebabnya sehingga dapat diantisipasi untuk rencana lima tahun berikutnya, untuk memilih program, kegiatan dan subkegiatan yang lebih prioritas / diutamakan. Namun hal ini perlu dilihat jenis indikatornya, bersifat kumulatif (penjumlahan dari tahun ke tahun) ataukah absolut (yang mandiri tiap tahunnya). Secara ringkas evaluasi ini dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.5.

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 dan Target
Renstra Tahun 2018-2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi	Target Capaian Renstra 2018-2023	Ket
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai	73,56	82,39	Belum tercapai & perlu upaya keras
1.1. Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD	%	100	100	Absolut / target tahunan
	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	%	100	100	Absolut / target tahunan
1.2. Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perencanaan pembangunan	Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	%	83,5	90	Belum tercapai & perlu upaya keras
	Persentase realisasi capaian RPJMD	%	86	88	Absolut / target tahunan
1.3. Meningkatnya hasil kelibangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	%	57	50	Absolut / target tahunan
	Persentase inovasi yang diimplementasikan	%	78,69	50	Absolut / target tahunan

Sumber Baperlitbang, 2023, diolah

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar tahun lalu (2022) dan tahun berjalan (2023), maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5. sedangkan kinerja untuk masing-masing program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana table 2.6.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPERLITBANG

Baperlitbang Kabupaten Karanganyar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kabupaten Karanganyar maupun dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.6.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Baperlitbang Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra Baperlitbang s/d tahun 2023
Kabupaten Karanganyar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja PD tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
1	01	BIDANG URUSAN PERENCANAAN											
01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,39	73,56	82,39	70,25	85,27	87,39	-			
01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	18 Dokumen	6 dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	3 Dokumen	15 Dokumen	83,3%
01	2	02		Administratif keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib laporan dokumen keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	42 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	7 bulan	35 bulan	83,3%
01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan keuangan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	66,7%
01	2	05		Administratif Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya kualitas SDM pegawai	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	100%	34 orang	35 orang	100%
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 laporan	2 laporan	66,7%
01	2	06		Administratif Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja PD tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		8=(7/6)	9
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan minuman harian pegawai dan makan minum rapat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Pemenuhan Bahan / Material Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Pemenuhan Konsumsi rapat, tamu dan pegawai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	40 item	21 buah	10 buah	10 buah	100%	16 buah	42 buah	105%
01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor	1 bangunan	-	-	-	-	-	-	-
01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksana jasa penunjang urusan pemerintahan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja PD tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran tagihan telepon, listrik, air dan internet, jumlah website Baperlitbang yang dikelola	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, jumlah unit kendaraan dinas yang pajaknya harus dibayar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Pemenuhan pemeliharaan peralatan kerja	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemenuhan pemeliharaan rutin gedung dan bangunan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
				PERENCANAAN									
02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN,DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian jumlah program yang memenuhi target								
02	2	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	2	01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	7 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	3 dokumen	6 dokumen	85,7%
02	2	02		Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	2	02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	66,7%

Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja PD tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02	2	03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	2	03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	7 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	5 dokumen	71,4%
03				PROGRAM KOOORDINASI dan SINGKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
03	2	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03	2	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	66,7%
03	2	01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	3 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	66,7%
03	2	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	3 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	66,7%
03	2	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Air)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03	2	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	66,7%

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja PD tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
03	2	02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	3 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	66,7%
03	2	02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembanguna daerah bidang perekonomian	3 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	66,7%
03	2	03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03	2	03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangun daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	3 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	66,7%
03	2	03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	3 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	66,7%
03	2	03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Kab. Karanganyar Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	3 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	66,7%
2	01			BIDANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									
02	2	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	2	04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah penelitian, pengembangan dan perekayasa di bidang teknologi dan inovasi	90 inovasi		30 inovasi	41 inovasi	137%	30 inovasi	101 inovasi	112%

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Baperlitbang adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RKPD dan RENJA);
3. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah (MUSRENBANG, Forum OPD /FORGAB OPD);
4. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun horizontal yakni antar BAPERLITBANG (musrenbangwil, Musrenbangprov, Musrenbangnas, Musrenbangkan tetangga dll).
5. Menyiapkan / memfasilitasi / mengkoordinasikan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi dan transparan;
6. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan.
7. Layanan perijinan KKN, PKL / Magang Mahasiswa/Pelajar;
8. Melakukan kajian dan kegiatan penelitian lainnya.

Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2022 terdapat 2 indikator yang memerlukan perhatian Upaya Baperlitbang dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan 7 jenis pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum BAPERLITBANG dan Forum Gabungan (forgab) Perangkat Daerah;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Baperlitbang dan OPD terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Baperlitbang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
3. Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *Focussed Group Discussion (FGD)*;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

2.3. Prestasi yang di capai pada Tahun 2022

Pencapaian prestasi yang bersifat perlombaan yang diikuti oleh BAPERLITBANG baik sebagai peserta ataupun sebagai fasilitator peserta, pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Juara 1 Laporan Terbaik IDSD Tahun 2022 se Prov. Jateng;
Merupakan lomba yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi (BAPPEDA) yang menilai indeks daya saing daerah dan hasil pelaporannya, dimana Baperlitbang Kab. Karanganyar menjadi pemenang Laporan IDSD Terbaik.
- 2) Juara 1 Krenova Kategori Masyarakat se SUBOSUKAWONOSRATEN
Lomba kreativitas dan inovasi kategori Masyarakat se SUBOSUKAWONOSRATEN yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Surakarta, dimana Wakil dari Kabupaten Karanganyar yang difasilitasi oleh BAPERLITBANG dengan inovasi berupa : **Tungku Ventury**
- 3) Juara Harapan I Krenova Kategori Pelajar se SUBOSUKAWONOSRATEN
Lomba kreativitas dan inovasi kategori Pelajar se SUBOSUKAWONOSRATEN yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Surakarta, dimana Wakil dari Kabupaten Karanganyar yang difasilitasi oleh BAPERLITBANG dengan inovasi berupa : **Gazebo Pengendali Pertanian.**

Tabel 2.7.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	Indeks Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022 (thn-2)	2023 (thn-1)	2024 (thn-n)	2025 (thn+1)	2026 (thn+2)	2022 (thn-2)	2023 (thn-1)	2024 (thn-n)	2025 (thn+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD	-	Membandingkan program dalam RKPD apakah sudah sesuai dengan prioritas nasional	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	
2.	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	-	Membandingkan program renja PD apakah sudah selaras dengan RKPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	
3.	Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	-	Membandingkan jumlah usulan kegiatan dalam musrenbang dengan kegiatan yang dapat ditampung dalam RKPD	86,00	90,00	-	-	-	83,50	-	-	-	
4.	Persentase realisasi capaian RPJMD	-	Membandingkan realisasi capaian RPJMD per OPD dengan target capaian dalam RPJMD	86,00	88,00	-	-	-	89,00	-	-	--	
5.	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	-	Membandingkan jumlah hasil kajian yang ada dengan kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	45,00	50,00	52,00	54,00	56,00	57,00	-	52,00	54,00	
6.	Persentase inovasi yang diimplementasikan	-	Membandingkan jumlah inovasi yang ada dengan inovasi yang diimplementasikan	45,00	47,00	50,00	51,00	52,00	78,69	-	50,00	51,00	
7.	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	-	Membandingkan jumlah OPD yang tercapai indikator IKU dan IKK dengan jumlah total OPD			100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	
8.	Komponen Perencanaan dalam SAKIP	-	Hasil Review SAKIP oleh Inspektorat			74,00	75,00	76,00	-	-	74,00	75,00	
9.	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	Membandingkan program, kegiatan, subkegiatan antara APBD PD apakah sudah selaras dengan RKPD			90,00	90,00	90,00	-	-	90,00	90,00	
10.	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD Bidang Perekonomian dan SDA	-	Membandingkan program, kegiatan, subkegiatan antara APBD PD apakah sudah selaras dengan RKPD			90,00	90,00	90,00	-	-	90,00	90,00	
11.	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	Membandingkan program, kegiatan, subkegiatan antara APBD PD apakah sudah selaras dengan RKPD			90,00	90,00	90,00	-	-	90,00	90,00	
12.	Indeks inovasi daerah	-				inovatif	inovatif	inovatif	-	-	inovatif	inovatif	

Sumber : Baperlitbang, 2023 diolah

- 4) Juara 3 (Top III) OPD dengan Pengawasan Arsip se Kabupaten Karanganyar
Merupakan lomba pengawasan / pengelolaan arsip perangkat daerah se Kabupaten Karanganyar yang diadakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPERLITBANG

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Baperlitbang selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas BAPERLITBANG juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa :

1. Semakin kritis dan sensitifnya masyarakat terhadap perencanaan pembangunan (adanya usulan-usulan yang selalu ditolak, sehingga masyarakat lebih cenderung apatis terhadap mekanisme perencanaan pembangunan)
2. Adanya anggapan buruk terhadap perencanaan pembangunan, (Musrenbang) hanya kegiatan formalitas saja
3. Iklim politik saat ini yang terlihat lebih dominannya Lembaga Legislatif dalam sistem Penganggaran.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Baperlitbang dan tingkat kinerja yang

dicapai oleh Baperlitbang dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap Ranwal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Baperlitbang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.8.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Baperlitbang Kabupaten Karanganyar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				8.158.032,36	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				8.217.088,539	
	PERENCANAAN				7.608.032,36	PERENCANAAN				7.667.088,539	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Karanganyar			4.983.032,36	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Karanganyar			5.042.088,539	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Terlaksananya tertib laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	81.632,3	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Terlaksananya tertib laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	81.632,3	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	4 dokumen	68.632,3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	4 dokumen	68.632,3	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	3.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	3.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	3.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	3.500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	6.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	6.000	
	Administratif keuangan Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Terlaksananya tertib laporan dokumen keuangan	100%	4.346.158,5	Administratif keuangan Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen laporan keuangan	100%	4.405.214,679	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang/ bulan	4.311.700	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan	32 orang/ bulan	4.370.756,079	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Penatausahaan keuangan dan laporan keuangan	12 Dokumen	30.408,5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Karanganyar	Penyusunan laporan Penatausahaan keuangan dan laporan keuangan	12 Dokumen	30.408,5	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	12 laporan	4.050	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	4.050	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Terlaksananya tertib laporan penatausahaan barang milik daerah	100%	3.050	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Terlaksananya tertib laporan penatausahaan barang milik daerah	100%	3.050	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	3.050	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	3.050	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	12.988,5	Administratif Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan ASN	100%	12.988,5	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 laporan	2.991,5	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 laporan	2.991,5	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.997	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.997	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	32 orang	4.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	32 orang	4.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Terlaksananya administrasi perkantoran	100%	195.570,86	Administratif Umum Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Pemenuhan Administrasi perkantoran	100%	195.570,86	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	8.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Karanganyar	Pemenuhan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	8.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah aset, peralatan dan mesin, jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	1 Paket	10.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah penyediaan minuman harian pegawai dan makan minum rapat	1 Paket	12.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	10.000	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kab. Karanganyar	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	10.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Dokumen	2.760	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Dokumen	2.760	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Bahan / Material Kantor	1 Paket	12.590,86	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Karanganyar	Pemenuhan Bahan / Material Kantor	1 Paket	12.590,86	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Karanganyar	Pemenuhan Konsumsi rapat, tamu dan pegawai	12 Laporan	12.985	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Karanganyar	Pemenuhan Konsumsi rapat, tamu dan pegawai	12 Laporan	12.985	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam da luar daerah	12 bulan	110.220	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam da luar daerah	12 bulan	110.220	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 bulan	6.515	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 bulan	6.515	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karanganyar	Pemenuhan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 bulan	10.500	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karanganyar	Pemenuhan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 bulan	10.500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karanganyar	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	3.250	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karanganyar	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	3.250	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	1	3.250	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	1	3.250	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Karanganyar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah bangunan gedung kantor	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karanganyar	Terlaksana jasa penunjang urusan pemerintahan	12 bulan	183.172,2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karanganyar	Terlaksana jasa penunjang urusan pemerintahan	12 bulan	183.172,2	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	22.941	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	22.941	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan pembayaran tagihan telepon, listrik, air dan internet, jumlah website Baperlitbang yang dikelola	12 bulan	107.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan pembayaran tagihan telepon, listrik, air dan internet, jumlah website Baperlitbang yang dikelola	12 bulan	107.400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	12 bulan	52.831,2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	12 bulan	52.831,2	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karanganyar	Terpeliharannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	157.210	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karanganyar	Terpeliharannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	157.210	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, jumlah unit kendaraan dinas yang pajaknya harus dibayar	12 bulan	128.330	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, jumlah unit kendaraan dinas yang pajaknya harus dibayar	12 bulan	128.330	
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan kerja	12 bulan	28.880	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan perbaikan peralatan kerja	12 bulan	28.880	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan pemeliharaan rutin gedung dan bangunan	-	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan pemeliharaan rutin gedung dan bangunan	-	-	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Karanganyar			1.150.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Karanganyar			1.150.000	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kab. Karanganyar	Terlaksananya koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan	100%	1.025.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kab. Karanganyar	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100%	1.025.000	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	3 dokumen	1.025.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Terlaksananya koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten	3 dokumen	1.025.000	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Karanganyar	Tersusunnya dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100%	25.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Karanganyar	Tersusunnya dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100%	25.000	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	43 dokumen	25.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	43 dokumen	25.000	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Karanganyar	Tersusunnya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100%	100.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Karanganyar	Tersusunnya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100%	100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	25.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Laporan	25.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	75.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	75.000	
	PROGRAM KOOORDINASI dan SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Karanganyar			1.475.000	PROGRAM KOOORDINASI dan SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Karanganyar			1.475.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Karanganyar	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	575.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Karanganyar	Jumlah Koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	575.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	145.825	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	145.825	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	121.810	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	121.810	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	13 Laporan	142.647	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	142.647	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	1 Laporan	164.718	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	164.718	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Karanganyar	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Air)	100%	450.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Karanganyar	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	450.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	110.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD) (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen perencanaan daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	110.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	5 Laporan	60.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan hasil monitoring pelaksanaan dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	10.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	2 Laporan	280.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan hasil koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	280.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Karanganyar	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	450.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Karanganyar	Jumlah koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	450.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	205.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	205.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	5 Laporan	40.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	5 Laporan	40.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	1 Laporan	205.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	1 Laporan	205.000	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Kab. Karanganyar			550.000	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Kab. Karanganyar			550.000	

No	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDAERAH	Kab. Karanganyar			550.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Karanganyar			550.000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. Karanganyar	Terlaksananya pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	100%	50.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Karanganyar	Jumlah inovasi dan teknologi yang dihasilkan	100%	50.000	
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kab. Karanganyar	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 dokumen	50.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	1 dokumen	50.000	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Karanganyar	Terlaksananya fasilitasi pengembangan inovasi dan teknologi	100%	500.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Karanganyar	Jumlah inovasi dan teknologi yang dihasilkan	100%	500.000	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	78 dokumen	500.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	78 dokumen	500.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAPERLITBANG sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas dan fungsi pada urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan menjadi *leading sector* atau koordinator.

Usulan program dalam Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan kegiatan dari masyarakat sesuai dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dan dijadikan acuan kegiatan dalam rancangan Renja. Dari kelompok masyarakat atau desa dan kelurahan maupun kecamatan sampai saat ini belum ada yang masuk yang melalui musrenbang ataupun proposal.

Tabel 2.9.

Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran perangkat daerah telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BAPERLITBANG Tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran tersebut digunakan sebagai pijakan awal dalam pemilihan / penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan agar tujuan dan sasaran tercapai, dan juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi perangkat daerah dapat diselesaikan. Setiap perangkat daerah pasti mempunyai peran dalam Pembangunan daerah atau pencapaian tujuan dan sasaran daerah, sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

Perencanaan pembangunan daerah memegang peranan utama dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan daerah juga harus sinkron dengan rencana Pembangunan nasional dan provinsi, agar tujuan dan sasaran nasional dan provinsi juga dapat tercapai. Untuk mewujudkannya perlu adanya telaah terhadap perencanaan nasional dan provinsi terkait tujuan, sasaran, prioritas, arah kebijakan, program, dan indikator serta targetnya.

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2024 merupakan tahun yang strategis karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 akan selesai, sehingga banyak sasaran nasional yang perlu disinergikan dengan Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 mempunyai Tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 melanjutkan 7 prioritas pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yaitu :

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
 - 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
 - 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
- Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 memuat 8 (delapan) arah kebijakan yaitu :
- 1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan Pendidikan;
 - 3) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
 - 4) Penguatan daya saing;
 - 5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
 - 6) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
 - 7) Percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN); dan
 - 8) Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 5,3-5,7%
2. Tingkat Kemiskinan, dengan target 6,5-7,5%
3. Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan target 5,0-5,7%
4. Nilai Tukar Nelayan, dengan target 107-110 poin
5. Rasio Gini, dengan target 0,374-0,377 poin
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan target 73,99-74,02 poin
7. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dengan target 27,27%
8. Nilai Tukar Petani, dengan target 105-108 poin.

3.1.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026. Tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah adalah “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari” yang akan dicapai dengan empat sasaran pembangunan daerah, meliputi :

- 1) Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;

- 2) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif;
- 3) Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- 4) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diarahkan pada :

- 1) Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
- 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
- 3) Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
- 4) Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif;

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024 diukur dengan 14 Indikator Kinerja Utama yang proyeksi awalnya sebagai berikut :

- 1) PDRB per kapita sebesar 40,93 juta rupiah;
- 2) Angka Kemiskinan sebesar 9,44 – 8,52 persen;
- 3) Rasio Gini sebesar 0,372;
- 4) Pertumbuhan Ekonomi 4,70 – 5,50 persen;
- 5) Inflasi pada angka 3 ± 1 persen;
- 6) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94 persen;
- 7) Nilai Tukar Petani sebesar 105,45;
- 8) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,43;
- 9) Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 57,56;
- 10) Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,68;
- 11) Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,20;
- 12) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,28;
- 13) Indeks Risiko Bencana turun 4 persen;
- 14) Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,00.

Sesuai dengan tugas dan fungsi BAPERLITBANG prioritas nasional dan provinsi yang terkait langsung dengan BAPERLITBANG adalah :

Tingkat Nasional :

- Prioritas 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public;

- Arah kebijakan 3) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, terutama dalam hal riset terapan.

Tingkat Provinsi :

- Prioritas 4) Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif;
- Arah kebijakan : 4) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah Meningkatkan Daya Saing Daerah, dengan indikator Indeks Daya Saing Daerah, pada tahun 2024 target : 3,750, sedangkan Sasarannya adalah :

- 1) Meningkatnya pemerataan pembangunan dan perlindungan social, dengan target indikator Angka Kemiskinan sebesar 8,52%;
- 2) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan, dengan target indikator Indek Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 77,20;
- 3) Meningkatnya daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi local, dengan target indikator Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,00%;
- 4) Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi, dengan target indikator Indek Reformasi Birokrasi sebesar 65;
- 5) Meningkatnya wilayah Tangguh bencana berbasis lingkungan dengan target indikator Indek Resiko Bencana sebesar 82.

Arah kebijakan tahun pertama (2024) adalah Peningkatan demokrasi dan kesejahteraan didukung pelaksanaan reformasi birokrasi (satu pintu, e goverment) serta penguatan SDM dan daya saing daerah. Prioritas pada tahun 2024 adalah :

- 1) Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi;
- 2) Pemantapan kondusivitas wilayah dan penguatan ketahanan bencana;
- 3) Perwujudan kualitas hidup SDM yang berdaya saing;

- 4) Percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem;

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran renja Baperlitbang Tahun 2024 sesuai dengan rumusan Renstra Baperlitbang Tahun 2024-2026, adalah :

Tabel 3.1.

Tujuan – Sasaran – Indikator dan Target Tahun 2024

No.	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Nilai Indek Reformasi Birokrasi (IRB) Daerah			Indeks	65
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74
			1.1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100
			Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif, dan implementatif	Nilai komponen perencanaan dalam SAKIP Daerah	%	30
			1.2. Program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan program renja OPD dengan program RKPD	%	100
			1.3. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Presentase kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan antara RKPD dan APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	90
				Presentase kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan antara RKPD dan APBD bidang perekonomian dan SDA	%	90
				Presentase kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan antara RKPD dan APBD bidang Infrastruktur dan kewilayahan	%	90
			Meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	indeks	inovatif
				Presentase kinerja program	%	100
			1.4. Program penelitian dan pengembangan daerah	Presentase hasil kajian yang di implementasikan menjadi kebijakan daerah	%	52
				Presentase inovasi yang di implementasikan	%	50

Sumber : Renstra Baperlitbang 2024-2026

3.3. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

3.3.1. Tantangan Perangkat Daerah

Lembaga Perencanaan (Bappenas dan Bappeda) seringkali dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan pembangunan

Indonesia terus berkembang, dan lembaga seperti Bappenas / Bappeda harus dapat melihat hal ini. Dalam perencanaan Pembangunan daerah beberapa tantangan seringkali muncul yaitu :

- 1) Semakin kompleksnya isu pembangunan, BAPERLITBANG memiliki kesempatan untuk bertransformasi menjadi lembaga yang lebih adaptif dan inovatif.
- 2) Tantangan kemajuan teknologi. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi, BAPERLITBANG dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan.
- 3) Pertama, adanya perubahan kebijakan yang konstan dan dinamis dapat memengaruhi kontinuitas dari rencana pembangunan nasional dan daerah. BAPERLITBANG harus tetap siap menghadapi perubahan politik untuk memastikan keberlanjutan dari program-program yang sudah direncanakan. Selain itu, koordinasi yang baik antara Bappenas dan Bappeda menjadi kunci sukses dalam menjalankan program pembangunan yang terintegrasi, menjadi tantangan tersendiri.
- 4) Perubahan Iklim seringkali mempengaruhi pelaksanaan suatu rencana, sehingga hasilnya tidak sesuai target. Misalnya untuk urusan pertanian : Perubahan iklim dapat mempengaruhi hasil pertanian dan sumber daya alam di daerah ini, yang dapat berdampak pada keberlangsungan Pembangunan;
- 5) Persaingan dengan daerah lain: Terdapat persaingan dengan daerah lain dalam hal investasi, sumber daya manusia, atau penarikan wisatawan, atau penarikan investor, perbedaan dalam penataaa ruang dll.
- 6) Konflik sosial atau politik yang Mengganggu Keberlanjutan Pembangunan: Konflik sosial atau politik dapat menyebabkan ketidakstabilan di daerah ini yang dapat menghambat pembangunan.
- 7) Fluktuasi Nilai Mata Uang: fluktuasi nilai mata uang dapat mempengaruhi daya saing produk dan kiriman dari daerah lain, mempengaruhi tingkat inflasi, daya beli Masyarakat dll.
- 8) Perubahan Kebijakan Pemerintah yang sering berganti-ganti atau berubah-ubah, kurang mendukung konsistensi rencana pembangunan: Pemerintah dapat mengubah kebijakan yang tidak mendukung pembangunan di daerah ini, seperti pembatasan

investasi atau perubahan regulasi yang mempengaruhi sektor tertentu.

3.3.2. Peluang Perangkat Daerah

Disamping adanya tantangan Lembaga Perencanaan (BAPERLITBANG) juga memiliki peluang antara lain adalah :

1. Stimulus Pemerintah untuk Pembangunan Daerah: Pemerintah memberikan berbagai insentif dan dukungan untuk pembangunan daerah, seperti program-program pengembangan wilayah dan investasi.
2. Potensi Kerjasama dengan Pihak Ketiga (Kolaborasi antar pihak): Daerah ini memiliki potensi untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga seperti perusahaan swasta atau NGO dalam membangun infrastruktur dan program-program pembangunan.
3. Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil: Daerah ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil, yang bisa menjadi basis untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi baru dan diversifikasi ekonomi.
4. Perubahan Kebijakan Pemerintah: disisi lain mendorong munculnya dan berkembangnya inovasi-inovasi baru. Pemerintah mengubah kebijakan yang mendukung pembangunan daerah, seperti perubahan regulasi yang mempermudah investasi dan pengembangan wilayah.
5. Peningkatan kebutuhan masyarakat dalam beberapa sektor tertentu, seperti pariwisata, pertanian, atau industri yang dapat memberikan peluang bagi daerah ini untuk mengembangkan sektor tersebut.
6. Selain itu, BAPERLITBANG dapat memainkan peran yang lebih proaktif dan inisiatif dalam mengembangkan strategi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Inisiatif seperti pengembangan infrastruktur ramah lingkungan dan promosi energi terbarukan dapat menjadi bagian dari rencana jangka panjang.

3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

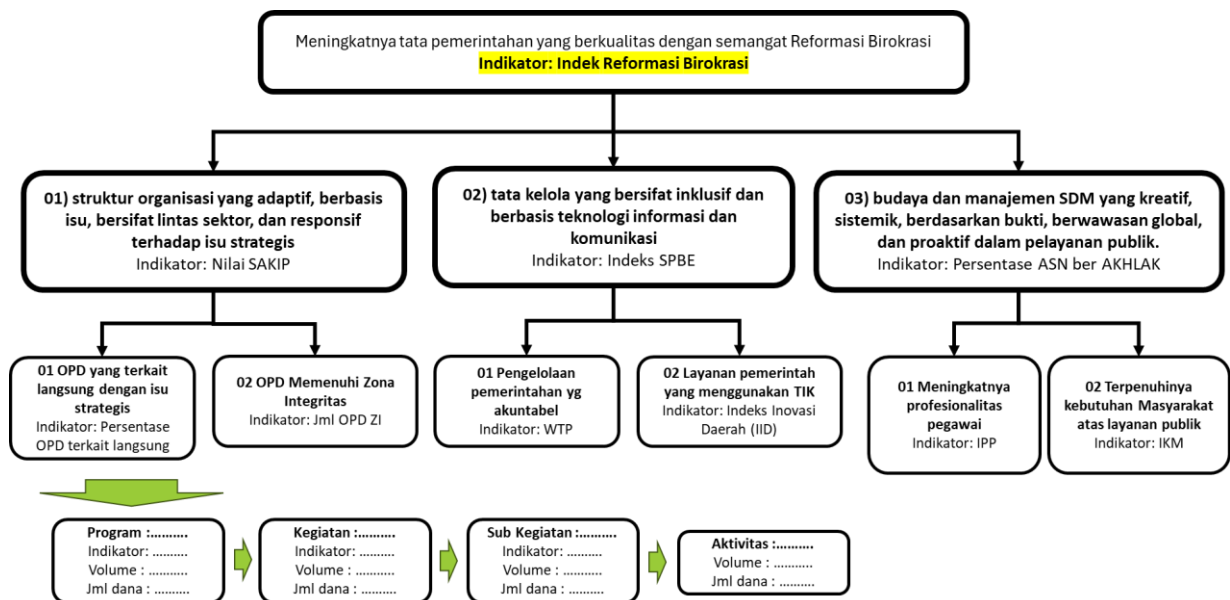
Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara BAPERLITBANG mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dan mengukur berhasil tidaknya. Terwujud tidaknya kinerja pelayanan BAPERLITBANG, yang ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program dan Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran atau pelaksanaan program dan kegiatan BAPERLITBANG merupakan pencapaian kinerja pelayanan BAPERLITBANG.

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja berikut :

3.4.1. Pohon kinerja daerah Sasaran 5

Sesuai urusan yang ditangani maka BAPERLITBANG masuk dalam Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, untuk Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sasaran 5 “Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi”.



Gambar 3.1

Pohon Kinerja Sasaran Daerah : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi

3.4.2. Pohon kinerja daerah perangkat daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Diuraikan lebih rinci pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan OPD

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2024 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2024. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program, kegiatan dan sub kegiatan BAPERLITBANG di tahun 2024 adalah sebagaimana tabal 4.1:

4.2 Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Pagu dana indikatif juga secara rinci dicantumkan dalam Tabel 4.1

4.3 Sumber Dana yang Dibutuhkan

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat.

Tabel 4.1.

Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif Tahun 2024

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	
5				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			8.217.088,539				10.765.000	
5.01				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan			8.217.088,539				10.765.000	
5.01				Perencanaan			7.667.088,539				10.165.000	
5.01	01			PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Baperlitbang	100%	5.042.088,539	DAU		100%	6.740.000
5.01	01.2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang dapat di susun dalam satu tahun	Baperlitbang	100%	81.632,3	DAU		100%	150.000
5.01	01.2	01	01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	Baperlitbang	4 dokumen	68.632,3	DAU		4 dokumen	100.000
5.01	01.2	01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Baperlitbang	2 dokumen	3.500	DAU		2 dokumen	10.000
5.01	01.2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Baperlitbang	2 laporan	3.500	DAU		2 laporan	10.000
5.01	01.2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Baperlitbang	4 laporan	6.000	DAU		4 laporan	30.000
5.01	01.2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun	Baperlitbang	100%	4.405.214,679	DAU		100%	4.750.000
5.01	01.2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Baperlitbang	32 orang/bulan	4.370.756,079	DAU		32 orang/bulan	4.700.000
5.01	01.2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan keuangan dan laporan keuangan	Baperlitbang	12 dokumen	30.408,5	DAU		12 dokumen	40.000.
5.01	01.2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Baperlitbang	12 laporan	4.050	DAU		12 laporan	10.000
5.01	01.2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi (penatausahaan) brang milik daerah	Baperlitbang	100%	3.050	DAU		100%	7.000
5.01	01.2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Baperlitbang	1 laporan	3.050	DAU		1 laporan	7.000
5.01	01.2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (ASN dan Non ASN)	Baperlitbang	100%	12.988.,5	DAU		100%	227.000

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	01.2	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Baperlitbang	1 dokumen	2.991,5	DAU		1 dokumen	7.000
5.01	01.2	05	05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Baperlitbang	1 dokumen	5.997	DAU		1 dokumen	12.500
5.01	01.2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	Baperlitbang		-	DAU			200.000
5.01	01.2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Baperlitbang	32 orang	4.000	DAU		32 orang	7.500
5.01	01.2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang di penuhi	Baperlitbang	100%	195.570,86	DAU		100%	321.000
5.01	01.2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Baperlitbang	1 paket	8.000	DAU		1paket	20.000
5.01	01.2	06	02	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	Baperlitbang	1 paket	10.000	DAU		1 paket	17.000
5.01	01.2	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	Baperlitbang	1 paket	12.000	DAU		1 paket	36.000
5.01	01.2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	Baperlitbang	1 paket	10.000	DAU		1paket	17.000
5.01	01.2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Baperlitbang	2 dokumen	2.760	DAU		2 dokumen	4.000
5.01	01.2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan / Material yang dis sediakan	Baperlitbang	1 paket	12.590,86	DAU		1 paket	18.000
5.01	01.2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Baperlitbang	12 laporan	12.985	DAU		12 laporan	22.000
5.01	01.2	06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Baperlitbang	12 Laporan	110.220	DAU		12 laporan	150.000
5.01	01.2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Baperlitbang	12 dokumen	6.515	DAU		12 dokumen	12.000
5.01	01.2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Baperlitbang	12 dokumrn	10.500	DAU		12 dokumen	25.000
5.01	01.2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang terpenuhi	Baperlitbang	100%	3.250	DAU		100%	625.000
5.01	01.2	07	02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Baperlitbang	-	-	DAU		-	425.000
5.01	01.2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Baperlitbang	1 Unit	3.250	DAU		1 unit	100.000

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	01.2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Baperlitbang		-	DAU			100.000
5.01	01.2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	Baperlitbang	12 Bulan	183.172,2	DAU		12 Bulan	210.000
5.01	1:02	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Baperlitbang	12 laporan	22.941	DAU		12 laporan	30.000
5.01	1:02	08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Baperlitbang	12 laporan	107.400	DAU		12 laporan	120.000
5.01	1:02	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Baperlitbang	12 laporan	52.831,2	DAU		12 laporan	60.000
5.01	1:02	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	Baperlitbang	100%	157.210	DAU		100%	450.000
5.01	1:02	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Baperlitbang	12 Bulan	128.330	DAU		12 Bulan	200.000
5.01	1:02	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Baperlitbang	12 Bulan	28.880	DAU		12 Bulan	50.000
5.01	1:02	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Baperlitbang	12 Bulan	-	DAU		12 Bulan	200.000
5.01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	Baperlitbang		1.150.000	DAU			1.200.000
5.01	02.2	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan yang dapat disusun dalam 1 tahun	Baperlitbang	100%	1.025.000	DAU		100%	1.030.000
5.01	02.2	01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Baperlitbang	3 dokumen	1.025.000	DAU		3 dokumen	1.030.000
5.01	2:02	2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase masukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan yang dapat disusun dalam 1 tahun	Baperlitbang	100%	25.000	DAU		100%	50.000
5.01	2:02	2	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baperlitbang	3 Dokumen	25.000	DAU		3 Dokumen	50.000
5.01	02.2	03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat disusun dalam 1 tahun	Baperlitbang	100%	100.000	DAU		100%	120.000

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5:01	2:02	03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Baperlitbang	4 Laporan	25.000	DAU		4 Laporan	35.000
5:01	2:02	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Baperlitbang	2 Laporan	75.000	DAU		2 Laporan	85.000
5.01	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD	Baperlitbang		1.475.000	DAU			2.225.000
5.01	03.2	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Baperlitbang	100%	575.000	DAU		100%	735.000
5.01	03.2	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Baperlitbang	4 Laporan	145.825	DAU		4 Laporan	185.000
5.01	03.2	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Baperlitbang	1 dokumen	121.810	DAU		1 dokumen	157.000
5.01	03.2	01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Baperlitbang	13 Laporan	142.647	DAU		13 Laporan	100.000
5.01	03.2	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD bidang pembangunan manusia	Baperlitbang	1 laporan	164.718	DAU		1 laporan	293.000
5.01	03.2	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	Baperlitbang	100%	450.000	DAU		100%	700.000
5.01	03.2	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Baperlitbang	4 dokumen	110.000	DAU		4 dokumen	225.000
5.01	03.2	02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Baperlitbang	5 Laporan	10.000	DAU		5 laporan	105.000
5.01	03.2	02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Baperlitbang	2 laporan	280.000	DAU		2 laporan	385.000
5.01	03.2	03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang fisik dan prasarana	Baperlitbang	100%	450.000	DAU		100%	790.000
5.01	03.2	03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangun daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Baperlitbang	1 dokumen	205.000	DAU		1 dokumen	260.000

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	03.2	03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Baperlitbang	5 Laporan	40.000	DAU		5 laporan	120.000
5.01	03.2	03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	Baperlitbang	1 laporan	205.000	DAU		1 laporan	410.000
5.01	5			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	Baperlitbang	52	550.000	DAU		52	600.000
					Persentase inovasi yang diimplementasikan	Baperlitbang	50		DAU		50	
5.05	02.2	01		Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	Prosentase jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola	Baperlitbang	100%	50.000	DAU		100%	75.000
5.05	02.2	01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Baperlitbang	1 Dokumen	50.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	75.000
5.05	02.2	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Capaian pengembangan inovasi dan teknologi	Baperlitbang	100%	500.000	Dana Alokasi Umum		100%	525.000
5.05	02.2	04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Baperlitbang	78 dokumen	500.000	Dana Alokasi Umum		78 dokumen	525.000

Sumber : Baperlitbang, 2023

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Menjadi bagian dari pencapaian tujuan dan Sasaran Pembangunan daerah yang diimplementasikan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program, kegiatan dan sub kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Renja dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan pembangunan di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan, yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPERLITBANG harus ada keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan (RKPD), maupun dokumen perencanaan jangka menengah (RENSTRA dan RPJMD).

Capaian kinerja sub kegiatan dan kegiatan akan mempengaruhi capaian satu program di atasnya (*cascading*) dan juga dapat mempengaruhi (*cross cutting*) capaian kinerja program lain dan satu perangkat daerah ataupun pada perangkat daerah lainnya. Untuk itulah penyusunan renja harus memperhatikan tugas dan fungsi BAPERLITBANG sebagai *leading* / coordinator dalam penyusunan dokumen Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Karanganyar.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja BAPERLITBANG Tahun 2024 sebagai berikut :

- 1) Dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Renja BAPERLITBANG Tahun 2024 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan / mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
- 2) Pelaksanaan Rencana Kerja BAPERLITBANG Tahun 2024, dalam mencapai target indicator yang telah ditetapkan (direncanakan) sangat bergantung pada besaran alokasi anggaran Tahun 2024;
- 3) Rencana Kerja BAPERLITBANG Tahun 2024, merupakan rencana program kegiatan dan sub kegiatan yang pelaksanaannya melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024;

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan telah tersusunnya Renja BAPERLITBANG Tahun 2024, diperlukan rencana tahapan selanjutnya yaitu :

- 1) Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai alokasi anggaran dalam RAPBD 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, sesuai alokasi anggaran dalam APBD 2024;
- 2) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah perlu:
 - a. penguatan kelembagaan dan stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan kelitbangan ;
 - b. sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya, penyelarasan penyelesaian permasalahan perencanaan dan kelitbangan;
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan secara rutin ataupun berkala, pelaksanaan Rencana Kerja;
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Dengan dilaksanakannya Rencana Kerja BAPERLITBANG Tahun 2024 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi BAPERLITBANG secara efektif dan efisien, dengan sumber daya manusia, sarana prasarana yang terbatas, dan teknologi yang semakin maju sehingga Kabupaten Karanganyar mempunyai daya saing yang tinggi.

BUPATI KARANGANYAR

JULIYATMONO



dihadapi BAPERLITBANG secara efektif dan efisien, dengan sumber daya manusia, sarana prasarana yang terbatas, dan teknologi yang semakin maju sehingga Kabupaten Karanganyar mempunyai daya saing yang tinggi.

BUPATI KARANGANYAR

ttd.

JULIYATMONO



dihadapi BAPERLITBANG secara efektif dan efisien, dengan sumber daya manusia, sarana prasarana yang terbatas, dan teknologi yang semakin maju sehingga Kabupaten Karanganyar mempunyai daya saing yang tinggi.

BUPATI KARANGANYAR

JULIYATMONO

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah	
2. Kepala BAPERLITBANG	
3. Sekretaris BAPERLITBANG	
4. Kepala Bidang Sosial dan Budaya BAPERLITBANG	

